
Penguatan Literasi Politik bagi Generasi Z (Kajian Sebelum Masa Pemilihan Umum 2024)

Tiyas Nur Haryani^{1*}, Muhammad Ikhsanul Amin², Arina Mardhiyana Husna³, Septiani Maya Lestari⁴

^{1*} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Abstrak: Dinamika politik di masyarakat selalu menjadi hal yang menarik dalam pembahasan publik. Indonesia yang telah mengalami banyak perubahan dalam aspek keterbukaan publik dan kebebasan yang bertanggung jawab pasca reformasi turut meningkatkan pendidikan dan literasi politik masyarakat. Terlebih saat ini, kehidupan banyak ditopang dengan perangkat Teknologi Komunikasi dan Informasi serta adanya keterbukaan informasi publik membuat dinamika publik tidak hanya terjadi di dunia nyata tapi juga dunia maya. Masyarakat harus berbekal literasi politik yang memadai untuk pengambilan keputusan publik yang kondusif. Saat ini struktur masyarakat memiliki ragam generasi yang lebih banyak, salah satunya ada generasi Z atau generasi Z. Generasi Z Indonesia sudah ikut serta menjadi bagian dalam dinamika politik daerah dan nasional. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan collaborative governance dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z dari hasil kajian literatur review. Literature review diambil dari jurnal nasional di google scholar dalam rentang waktu terbit 2014-2020 dengan kata kunci pilihan mengenai literasi politik, pendidikan politik, generasi Z dan collaborative governance. Hasil kajian memperoleh hasil, bahwa model collaborative governance dalam penguatan literasi politik belum terbangun di Indonesia sekalipun sudah banyak aktor yang melakukan pendidikan politik. Maka, rekomendasi penelitian awalan ini adalah menawarkan model collaborative governance sektor suprastruktur dan infrastruktur politik dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z.

Kata Kunci: *collaborative governance; generasi Z; literasi politik*

Abstrak: Political dynamics in society has always been an interesting subject in public discussion. Political dynamics occur every day in social life in society. The development of life today is mostly supported by Information and Communication Technology devices as well as the openness of the public making public dynamics occur in the real world as well as in cyberspace. Society must be armed with adequate political literacy for public decision making. Currently, the structure of society has a wider variety of generations, one of which is the postmillennial generation or generation Z. Generation Z Indonesia has participated in the political world. This article seeks to describe collaborative governance efforts in strengthening political literacy for the postmillennial generation. The article was compiled from the results of a literature review study which was finally able to be presented in a narrative. The literature reviews used come from national journals on millennial generation, politics, general elections, generation Z and political literacy published in the period 2018-2020. The results of the literature review show that the political literacy of the postmillennial generation is mostly assisted by social media. Thus, collaborative governance in the superstructure sector and political infrastructure needs to be supported by Information and Communication Technology.

Keywords: *collaborative governance; generation Z; political literacy*

Pendahuluan

Kehidupan dunia maya sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat modern saat ini. Industri 4.0 memang ditandai dengan komputerisasi dan otomatisasi yang lebih cepat dalam menunjang kerja manusia. Beberapa mesin bahkan mampu menggantikan fungsi manusia dalam

kerja. Era Industri 4.0 juga ditandai dengan Big Data. Status quo menunjukkan bahwa penetrasi Internet dan gawai di ruang publik turut memantik proses intrik dalam politik formal. Penggunaan Internet untuk mencari berita politik meningkat sejak Pemilu 2008 di Amerika Serikat dan diikuti tren penggunaan sosial media dalam komunikasi politik di Pemilihan Presiden tahun 2014 di Indonesia.

Saat ini, Internet dan sosial media menjadi media kedua yang paling banyak dijadikan rujukan berita politik setelah televisi. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya *big data* dalam industri 4.0. Kombinasi antara kepentingan politik dan *platform* media Internet dapat memproduksi informasi secara cepat dan memberi kemudahan keterbukaan ruang partisipasi publik, namun pada akhirnya diikuti *patology* berupa ujaran kebencian dan hoaks. Hal ini dikonfirmasi oleh organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang mencatat selama Juli-September 2018 terdapat jumlah hoaks politik mencapai 58,7% dari akumulasi hoaks yang teridentifikasi (Mafindo, 2019). Riset dari DailySocial.id (2018) juga mencatat sebanyak 44,19 persen masyarakat Indonesia mengaku tidak memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita *hoaks*.

Era revolusi industri 4.0 juga memiliki kondisi *gap generation* dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Jika sebelumnya ada generasi babyboomers, generasi X dan generasi milenial. Saat ini zaman ini juga ditandai dengan lahirnya generasi Z atau Generasi (Gen) Z. *Gap generation* dalam masyarakat terkadang bukan hal yang mulus diterima masyarakat, sebab setiap generasi memiliki latar belakang kehidupan sosial budaya dan karakteristiknya masing-masing. Membicarakan mengenai generasi Z, mereka adalah *digital native* atau anak-anak yang terlahir di masa perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi sudah sedemikian pesatnya pasca Revolusi Industri 3.0. Pengertian Z (Generasi Z) menurut IPSOS adalah mereka yang terlahir di awal tahun 2000an atau dalam tumbuh kembangnya sudah mengenal dan menggunakan gawai, perangkat komputer dan internet (IPSOS, 2019).

Kondisi di Indonesia pada masa para generasi Z lahir sudah berlimpah perangkat Teknologi Komunikasi dan Informasi yang dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dengan harga dan spesifikasi barang yang beragam. Tak heran apabila generasi Z memiliki ciri *Instant Communications, Network Development*, yaitu mengembangkan jaringan yang memungkinkan generasi ini untuk terhubung satu sama lain untuk berkoneksi dan kolaborasi, *Gadget-Powered Connection*, yaitu generasi pencinta gadget yang selalu menyediakan koneksi melalui gadget (Wirawan, 2018).

Selain dari aspek perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi, generasi Z di Indonesia lahir pada masa sistem politik dalam negeri yang relatif terbuka dan stabil dari ancaman konflik ataupun huru hara politik. Kondisi politik dalam negeri yang lebih stabil turut mempengaruhi perekonomian dalam negeri sehingga tingkat kemakmuran masyarakat di masa

generasi Z jauh lebih baik dibandingkan era generasi X dan Y yang tumbuh dengan adanya beberapa krisis ekonomi dan gangguan stabilitas nasional.

Potret kondisi tersebut sangat mempengaruhi karakteristik generasi Z yang dinilai cukup berbeda dari generasi sebelumnya. Kehidupannya yang sudah banyak ditopang dengan teknologi membuat sebagian besar generasi Z menyukai hal yang bersifat instan, *real time* bebas berekspresi dan *hyper* teknologi (Wirawan, 2018). Generasi Z juga dipandang memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dari generasi millennial yakni lebih tertarik pada pembahasan yang bersifat personalisasi, *skill technopreneurship* dibandingkan hal-hal yang bersifat kaku seperti politik. Kajian yang dilakukan sebelumnya oleh Rosadi (2020) mengungkapkan bahwa preferensi tersebut dapat mempengaruhi *trust* generasi millennial terhadap politik serta tingkat literasi politik mereka (Rosadi, Bakhtiar, Cecep Darmawan, 2020). Literasi Politik muncul karena kapasitas internal masyarakat dan intervensi aktor eksternal terhadap kapasitas tersebut. Lalu, literasi politik juga muncul akibat sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu politik yang rasional. Pada posisi tersebut faktor eksternal sangat berpengaruh dalam menghadirkan masyarakat yang literer secara politik kaitannya dengan narasi kandidat pemilu dan partai politik yang mengusungnya. Semakin rasional dan konstruktif narasi yang dimunculkan, maka semakin kuat katalisator untuk meningkatkan sensitivitas masyarakat dalam mengkonsumsi informasi politik sebagai bahan untuk melakukan kegiatan literasi politik. Faktor pendukung turunnya ketertarikan dan kepercayaan generasi Z dalam politik dapat disebabkan oleh permasalahan partai politik, seperti buruknya manajemen partai, banyaknya kasus KKN, serta kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya (Rosadi, Bakhtiar, Cecep Darmawan, 2020).

Kedekatan para generasi Z dengan perangkat Teknologi Komunikasi dan Informasi membuat mereka menyukai informasi politik dalam pesan politik di media sosial dan partisipasi politik secara daring (Juditha, 2018; Bakhtiyar, 2018; Wirawan, 2018; Tarsidi, dkk, 2019; Nur, 2020; Rosadi, Bakhtiar, Cecep Darmawan, 2020). Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan baru dalam pengarusutamaan literasi politik bagi generasi Z. Padahal generasi Z menjadi penyumbang terbesar pengguna internet di Indonesia. Sebanyak 91% Generasi Z adalah pengguna internet aktif (Beritagar.id, 2019). Dalam pertarungan politik, Generasi Z saat ini mendominasi sebagai pemilih pemula di Indonesia. Beberapa dari mereka telah ikut dalam Pemilu tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Penguasaan atas teknologi informasi terkini yang dimiliki Generasi Z ternyata tidak berbanding lurus dengan jeratan berita bohong (hoax). Dalam masyarakat *Post-Secular*, posisi Generasi Z sebagai pemilih pemula tidak bisa dinafikan. Generasi Z sebagai pemilih pemula adalah penguasa atas dunia internet. Merekalah pemilik masa mendatang. Namun mereka masih bisa dan mudah terkena hoax. Implikasi dari kurangnya literasi politik di tengah penetrasi hoaks dan ujaran

kebencian sebagai akses kepentingan politik menyebabkan semakin terakumulasinya masyarakat yang mengaktualisasikan tindakan destruktif di tengah sistem politik-demokrasi. Literasi politik secara singkat adalah keadaan memiliki informasi politik. Literasi politik dapat juga dipahami sebagai pemahaman individu tentang peristiwa politik dan kesadaran politik mereka.

Mau tidak mau kita harus akui, penggunaan hoax dalam politik formal dan atau elektoral juga merupakan buah dari tindakan politik dari kelompok yang masih berpedoman bahwa politik adalah alat kekuasaan. Penyebaran hoax adalah hal yang salah dihadapan etika dan filsafat. Untuk itu perlu sebuah model kolaborasi untuk menguatkan literasi politik yang laik demi tidak adanya hoax dalam tiap peristiwa politik. Literasi politik diperlukan supaya masyarakat secara umum dan generasi Z pada khususnya dapat mudah memahami, memilah, dan mengaktualisasikan informasi yang didapat melalui media penyedia berita politik secara efektif.

Habitus bisa diubah (Bourdieu,2014). Cara kerjanya hampir sama dengan penyebaran hoax. Harus dilakukan dengan terus menerus dan sedini mungkin. Dalam konteks politik, habitus yang mudah terkena hoax bisa diubah dengan model penguatan literasi politik yang tepat dan dilakukan terus menerus. Lebih dini lebih baik. Selama ini peran *stakeholder* partai politik diakui masih dirasakan minim dalam memberikan literasi politik yang laik kepada masyarakat luas (Ariestino, 2017). Partai politik dinilai belum menjadi *front leader* dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat (Nasution, 2012).

Selain dari sisi partai politik, Goldsmith dan Eggers (2004) menyatakan bahwa birokrasi hirarkis sudah tidak lagi dapat memenuhi permintaan yang kompleks dan dianggap tidak cocok untuk menghadapi permasalahan masyarakat yang sering melampaui batas-batas organisasi. Diungkapkan oleh Amsori (2017) bahwa pendidikan dan literasi politik memang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari partai politik, tapi juga menjadi tanggung jawab elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, keluarga dan penyelenggara pemilihan umum. Maka, *Collaborative governance* sebagai salah satu konsepsi tata pemerintahan dinilai mampu untuk mengatasi kompleksitas manajemen institusi saat ini. *Collaborative governance* harapannya menjadi konsepsi yang dapat menginternalisasikan literasi politik bagi generasi Z secara optimal dan lintas sektor.

Collaborative governance adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam proses melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta asset publik dengan pembagian peran (Ansell & Alison Gash, 2007). *Collaborative governance* tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja (Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2011). Maka keterlibatan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan dilakukan

secara egaliter merupakan hal yang penting dalam *Collaborative governance* (Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2011).

Collaborative governance menurut Ansell & Alison Gash (2007) memiliki enam kriteria penting yakni; forum diprakarsai oleh lembaga publik, keterwakilan peserta pemerintah dan non-pemerintah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, forum formal secara terorganisir dan kolektif, adanya konsensus, dan beroutput pada kebijakan dan atau manajemen publik. Sedangkan penelitian dari Mutiarawati dan Sudarmo (2017) dengan kajian *collaborative governance* di Indonesia mengukur dari struktur jaringan, komitmen, *trust*, kejelasan dalam tata kelola, akses kekuasaan, pembagian akuntabilitas dan responsibilitas, berbagi informasi dan akses sumber daya.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam lingkup bidang politik khususnya topik pendidikan politik, belum ada yang membahas pemetaan *collaborative governance* dan generasi Z dalam literasi politik. Penelitian ini akan melakukan identifikasi dan deskripsi dari model *collaborative governance* dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z. Dalam penelitian awalan dengan studi *literature review* tim penulis membangun *state of the art* batasan penelitian tentang *collaborative governance* dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z antara lain pada indikator; aspek keterwakilan peserta pemerintah dan non-pemerintah, struktur jaringan dan akses kekuasaan. Lebih lanjut harapannya akan ada penelitian lanjutan yang mengkaji seluruh indikator dalam *collaborative governance*.

Metode

Penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial. Penelitian ini mendeskripsikan *collaborative governance* dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z. Hasil deskripsi dari subjek penelitian berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu model tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena *collaborative governance* penguatan literasi politik bagi generasi Z di Indonesia.

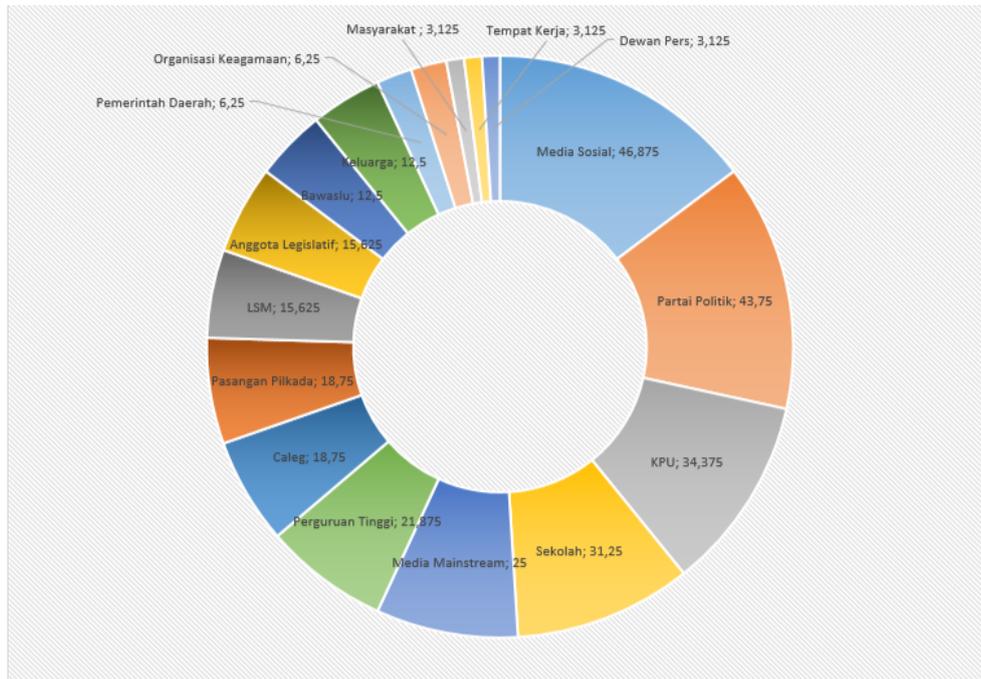
Dalam menguji keabsahan data penelitian, tim penulis menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber referensi dokumen yang tersedia. Tim penulis menggunakan analisis interaktif fungsional, yang berpangkal dari empat kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah *pertama* pengumpulan data untuk kajian *literature review*, dengan subjek penelitian mencakup artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian ini yang telah diterbitkan pada jurnal dan prosiding nasional di laman <https://scholar.google.co.id> yang terbit antara tahun 2014-2020. Penelitian ini membatasi pencarian naskah dengan kata kunci “literasi politik”, “generasi Z”, “pendidikan politik” dan “*collaborative governance*”. Hasil pencarian didapatkan 14.500 publikasi dari kata kunci “literasi politik”, 17.300 dengan kata kunci “generasi Z”, 56.500 dari kata kunci “pendidikan politik” dan

6.720 dari kata kunci “*collaborative governance*”. Berdasarkan inklusi dan eksklusi term ini hanya peneliti ambil 35 publikasi ilmiah yang *eligible* untuk dianalisis. Adapun indikator yang menjadi rumusan masalah dalam batasan indikator aspek keterwakilan peserta pemerintah dan non-pemerintah, struktur jaringan dan akses kekuasaan. *Kedua*, Reduksi data akan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis mengenai indikator penting yang peneliti gunakan. Reduksi data dalam pemilihan data sekunder digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai *state of the art* yang dibangun, serta inklusi dan eksklusi literatur review. Data *literature review* dari 35 artikel ilmiah dibaca secara mendalam, kemudian disortir sebagai bentuk rangkuman topik penelitian inklusif yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu serta arah kontribusi dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengolahan data menggunakan *software* ATLAS.ti 9 dan tabulasi dalam Microsoft Excel. *Ketiga*, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi, diagram dan bagan. *Keempat*, verifikasi adalah suatu tujuan pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang diuji kebenaran dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya.

Hasil dan Pembahasan

Penguatan literasi politik bagi generasi Z menjadi hal penting dalam rangka pembangunan bangsa dan sumber daya manusia. Literasi politik bagi generasi Z harus dapat dikemas dengan pesan komunikasi yang ringan dan desain yang menarik agar lebih menarik perhatian mereka. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi generasi Z dalam politik terlibat dalam aktivitas instrumental dan informatif dibandingkan strategis yakni bentuk menonton, membaca dan mencari informasi politik dalam media sosial dibandingkan dengan partisipasi yang melibatkan orang lain seperti berinteraksi dan memengaruhi orang untuk memilih calon tertentu (Yolanda, 2020). Pengetahuan dan sikap generasi Z dalam politik tidak lagi didasari dari preferensi orang terdekat atau keluarga, mereka dapat menentukan pilihan informasi yang hendak digali dan pendalamannya menyoal politik. Penguatan literasi politik tidak bisa bertumpu pada salah satu lembaga sekalipun ada salah satu lembaga yang bergerak selaku *leading sector*.

Hasil penelitian *literature review* menunjukkan bahwa pembahasan yang sering muncul dalam penelitian penguatan pendidikan dan/atau literasi politik memunculkan *stakeholders* yang hampir menyentuh semua lini bidang pembangunan. Hasil dari pemetaan *word cloud* dengan *software* ATLAS.ti menunjukkan sebagai berikut dalam gambar 1.



Gambar 2

Tabulasi Kemunculan Aktor Literasi Politik

Sumber : Data diolah Ms Excel, 2020

Hasil *literature review* didapatkan temuan bahwa partai politik dalam penguatan literasi politik dapat berperan antara lain dalam hal; sarana komunikasi politik, memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik yang sesuai dengan karakter generasi muda, melakukan kampanye politik, (Aina, 2015; Amsori, 2017; Hermawan, 2020). Partai politik juga memegang peranan besar sebagai pilar demokrasi. Pada titik tertentu, parpol dengan tulus harus turut ambil bagian dalam meningkatkan literasi politik pada generasi muda untuk tujuan kesejahteraan publik bukan semata pada kekuasaan. Struktur jaringan yang terdapat dalam partai politik terkait tata kelolanya harus dapat mempresentasikan struktur hubungan yang menitikberatkan pada fungsi koordinasi. Literasi politik muncul akibat sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu politik yang rasional. Pada posisi tersebut narasi kandidat pemilu dan partai politik yang mengusungnya harus semakin rasional dan konstruktif untuk meningkatkan katalisator dan sensitivitas masyarakat dalam mengkonsumsi informasi politik sebagai bahan untuk melakukan kegiatan literasi politik.

Selanjutnya lembaga dominan ketiga yang berperan dalam penguatan literasi politik adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tentu saja akan berupaya memberi informasi kepada pemilih yang sesuai dengan norma perUndang-Undang

yang ada. Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dapat bersama-sama menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada level pemerintahan pusat dan Dinas Komunikasi dan Informasi di level daerah, Partai Politik, Aktor Politik, Organisasi Masyarakat Sipil, Media *Mainstream*, Media Online, Perguruan Tinggi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, dan para pengiat Sosial Politik di level masyarakat bawah (mereka yang menaruh perhatian lebih kepada kondisi sosial politik) duduk bersama dalam satu forum untuk menggagas literasi politik bagi generasi Z (Amsori, 2017; Putri, 2017; Katarudin, 2018; Pattipeilohy, 2018; Yusriati, 2020). Kebijakan dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh KPU bersama para *stakeholders* dalam meningkatkan literasi politik di antaranya adalah melakukan program atau kegiatan seperti; mendata dan menganalisis isu-isu politik kontemporer, melakukan pendidikan politik menyeluruh di luar pendidikan tentang pemilu atau pemilihan, diseminasi kepada masyarakat luas melalui media massa *mainstream* dan media online (Putri, 2017).

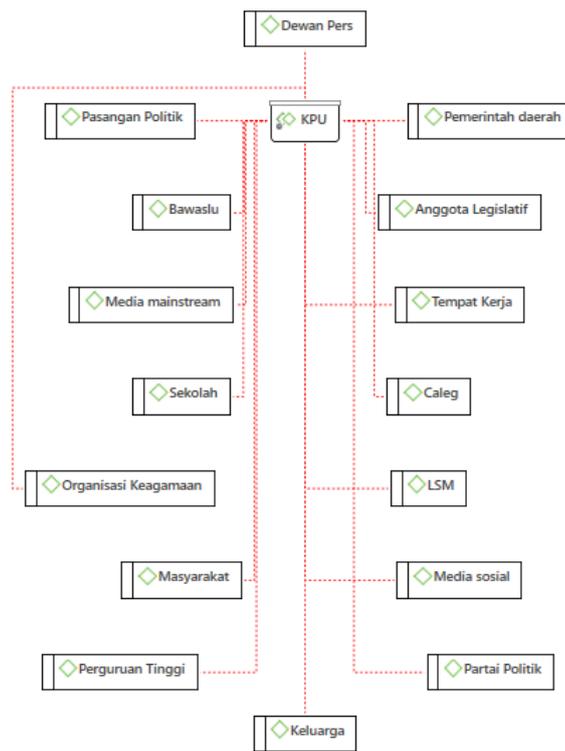
Keterlibatan sektor pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan formal dan non-formal penting dalam penguatan literasi politik. Dalam bidang Pendidikan formal yaitu dengan memberikan literasi politik dalam kurikulum pembelajaran sekolah, khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan. Dalam Pendidikan non-formal yaitu dengan megedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah maupun Lembaga sosial masyarakat. Dalam kondisi saat ini, generasi *postmillennial* memiliki ketertarikan terhadap pengetahuan terkait politik jika pendidikan politik mereka dilaksanakan melalui media sosial. Namun, aktor media *mainstream* maupun online dapat pula menjadi perantara dan distributor penyebaran hoax harus kembali mawas diri. Pemerintah pusat maupun daerah lewat Kominfo dapat melakukan pengawasan superketat terhadap media *mainstream* dan online. Dibutuhkan jalan tengah antara media dan pemerintah agar alur informasi tidak lagi bermuatan hoax, tapi juga pemerintah tak perlu terlalu dalam mengawasi warganya. Setiawan (2020) memberikan masukan dalam hasil penelitiannya menyoal merebaknya hoax yakni mengoptimalkan fungsi dewan pers. Dalam penguatan literasi politik, dewan pers dapat dilibatkan bersama *stakeholders* lainnya. Hal ini harapannya membuat warga masyarakat lebih tenang dalam melakukan aktifitas literasinya dan peningkatan literasi politik.

Lalu, Bawaslu harus memiliki ketegasan manakala terdapat peserta pemilu yang sudah melewati penjaringan namun tetap menggunakan narasi destruktif seperti SARA dan hoaks dengan memberikan sanksi berjenjang. Hal ini supaya publik dapat menikmati pemilu yang konstruktif sehingga mematik kebutuhan akan pentingnya literasi politik. Para aktor perlu memiliki kerangka kerja yang sama dalam penguatan literasi politik bahwa literasi politik muncul akibat kapasitas

masyarakat dalam mengolah informasi, berfikir rasional, dan bersikap konstruktif. Pada posisi tersebut pendidikan politik menjadi faktor determinan dalam menghadirkan literasi politik. Aktor yang harus dihadirkan adalah sekolah, partai politik, lingkungan masyarakat, maupun LSM/NGO. Keterlibatan berbagai aktor sangat menentukan literasi politik bagi Generasi Z.

Kontestasi politik tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah, dalam hal ini adalah sebagai penyelenggara pemilu. Dalam *collaborative governance* proses kolaborasi antar aktor pemerintah dan non-pemerintah berjalan secara egaliter, namun tetap dibutuhkan *leading sector* dalam penguatan literasi politik masyarakat khususnya pada pemilih pemula generasi Z yakni KPU. Secara struktur kelembagaan dan akses kekuasaan, struktur tersebut sudah merepresentasikan struktur jaringan dan kewenangan dalam menjalankan tugas, karena terdapat jenjang/tingkatan dalam penyelenggaraan pemilu.

Collaborative governance dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z belum ditemukan dalam penelitian terdahulu. Seluruh publikasi ilmiah yang telah direview mendalam tidak ada satupun yang menunjukkan model *Collaborative governance* dalam penguatan literasi politik bagi generasi Z. Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan literasi politik masih dilakukan secara parsial oleh setiap aktor dan/atau hanya segelintir aktor yang terlibat dan dilibatkan. Melihat pemetaan peran setiap aktor, pada dasarnya penguatan literasi politik akan semakin maksimal manakala *stakeholders* memiliki forum bersama dalam jejaring yang bersifat egaliter untuk membangun literasi politik masyarakat. Hasil *literature review* 87,5% belum ada temuan struktur jaringan *Collaborative governance* dalam penguatan literasi politik. Maka berikut gambar 4 menggambarkan model *collaborative governance* yang berhasil peneliti rumuskan dari kajian *literature review* ini.



Gambar 3

Struktur jaringan Keterlibatan Aktor *Collaborative Governance* Penguatan Literasi Politik bagi Generasi Z

Sumber : Data diolah ATLAS.it, 2020

Simpulan

Generasi Z yang saat ini mulai masuk dalam aktivitas politik formal perlu mendapatkan perhatian oleh para pemangku kepentingan. Mereka perlu dibekali dengan literasi politik yang memadai, terlebih para generasi Z adalah *digital native* yang mudah terpapar berita hoax maupun *hate speech*. Struktur jaringan *collaborative governance* menempatkan lembaga Bawaslu, KPU dan partai politik sebagai kelompok faktor eksternal dalam penguatan literasi politik. Aspek keterwakilan seluruh lembaga suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus terlibat dalam penguatan literasi politik untuk masyarakat pada umumnya. *Leading sector* program penguatan literasi politik dapat dipegang oleh KPU. Lalu, eksekutif dan legislatif selaku pembuat kebijakan perlu memformulasi kebijakan *top down* yang dapat membantu penguatan literasi politik bagi generasi bangsa. Pembuat kebijakan tentu sekaligus sebagai pihak yang memiliki akses kekuasaan dalam formulasi kebijakan ini. Selanjutnya lembaga non pemerintah dapat ikut terlibat sebagai pelaksana.

Daftar Pustaka

- Ansell, Crish & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governanance in Theory and Practice*. Berkeley: University of California.
- Amsori. 2017. Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017 (Studi Pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok). *Journal Of Empowerment Vol. 1, No. 1, Juni 2017*
- Ariestino, Lutter dan Sri Kusriyah. 2017. Peran Partai Politik di dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka untuk Meningkatkan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat dalam Proses Pemilu di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017*.
- Bakhtiyar. 2018. Dinamika Literasi Politik Menjelang Tahun 2019 : Urgensitas Memahami Perilaku Pemilih Milenial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 2, No 2, Desember 2018*
- Beritagar.id. 2019. *Generasi Z, Pengguna Internet Terbesar di Indonesia*. <https://beritagar.id/artikel/berita/generasi-z-pengguna-internet-terbesar-di-indonesia> (Diakses 25 Januari 2020)
- Bourdieu, Pierre. 2014. *Menyingkap Kuasa Simbol*. Penerbit Jalasutra.
- DailySocial.id. 2018. *Hoaks Distribution Through Digital Platforms in Indonesia 2018*. Jakarta: DailySocial.id.
- Emerson, Kirk; Tina Nabatchi; Stephen Balogh. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Jurnal of Public Administration Research and Theory*.
- Goldsmith, Stephen and Eggers, William D. 2004. *Governing by Network*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- IPSOS, Flair Collection. 2018. *Indonesia 2018, Dealing with the Opposites*. Ipsos Public Affairs.
- Juditha, C. dan J. J. D. (2018). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2), pp. 91–105.
- Mafindo, 2019. *mafindo.or.id*. [Online] Available at: <https://www.mafindo.or.id/2019/03/16/siaran-pers-meningkatnya-dominasi-hoaks-politik-jelang-pemilu/> [Diakses 28 September 2019].
- Mutiawati, Tika dan Sudarmo. 2017. *Collaborative Governanance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2, 2017 halaman 48-62*.
- Nasution, Muhammad Arifin. 2012. Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik Dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Politeia Vol.4 No.1 2012*.
- Nur, Emislyah. 2020. Tanggapan Generasi Z Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mendukung Keterlibatan Dalam Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 24 No. 2 (2020)*.

-
- Rosadi, Bakhtiar, Cecep Darmawan, L. A. (2020) The Influence Of Political Message On Social Media For Increasing The Political Literacy Of Millennial Generation, *Jurnal Civicus*, 20(1), Pp. 26–30.
- Tarsidi, dkk. 2019. Orientasi “Poligami” (Politik Generasi Millennial) Dalam Menghadapi Pesta Demokrasi 2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019 Psikologi Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang & Tantangan Fakultas Pendidikan Psikologi, Aula C1, 4 Mei 2019*
- Wirawan, I. G. M. A. S. Dan N. P. R. Y. (2018) Ekspresi Politik Generasi Millennial Pada Pilgub Bali Tahun 2018, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke - 2 “Merekonstruksi Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial Dalam Membangun Karakter Bangsa. Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha*, Pp. 170–182. Available At: [Http://Eproceeding.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/SENAHIS/Index](http://Eproceeding.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/SENAHIS/Index)
- Yolanda, H. P. Y. Dan U. H. (2020) Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019, *Coverage: Journal Of Strategic Communication*, 10(2), Pp. 30–39.